



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : KETUT GEDE MUDIARTA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 741859

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.786.700.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m<sup>2</sup>/65 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
3. Tanah Seluas 1.500 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BULELENG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 210 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANGLI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 52.500.000
5. Tanah Seluas 410 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANGLI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 400.070.000
6. Tanah Seluas 3.180 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANGLI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 159.000.000
7. Tanah Seluas 3.190 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANGLI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 150.130.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 324.000.000

1. MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 190.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 1.364.508.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.665.208.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.665.208.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.